



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EPI RUSTAM
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 252884

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.665.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/100 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
3. Tanah Seluas 1484 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **331.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, CHEVROLET TRAX MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. MOTOR, SUZUKI GSX 150 MANUAL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **121.575.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **120.166.231**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.237.741.231

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 2.237.741.231

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HOLIL BADAWI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 243632

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/175 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	325.500.000
1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	133.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	979.750.000
III. HUTANG	Rp.	210.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	769.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DINA GARDIANA PRAFITASARI, SE.,M.SI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 853421

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	6.100.000.000
1. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
2. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
3. Tanah Seluas 32 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000		
4. Tanah Seluas 1518 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	760.000.000
1. MOBIL, PAJERO EXCEED Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOBIL, PAJERO EXCEED DAKKAR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
3. MOBIL, XPANDER ULTIMATE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	84.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.650.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	420.000.000
Sub Total	Rp.	9.114.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.114.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.